



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

JUMAT, 29 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020

PEMOHON

1. Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka (Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Nikolas Johan Kilikily dan Desianus Orno (Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Kepulauan Aru
KPU Kabupaten Maluku Barat Daya
KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 29 Januari 2021, Pukul 08.06 - 09.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Suhartoyo
- 3) Daniel Yusmic P. Foekh

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Hani Adhani
I Made Gede W. T. K**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

Timotius Kaidel

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yohanis Romodi Ngurmetan
2. Hendra Jamlaay
3. Fidelis Angwarmasse

C. Pemohon Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

Nikolas Johan Kilikily

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XIX/2021:

Urbanus Mamu

E. Pemohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

Arobi Kelian

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Novi Manaban
2. Danu Hurmuja

G. Termohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

Mustafa Darakay (Ketua KPU Kab. Kepulauan Aru)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

Abdul Haji Talaohu

I. Termohon Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jacob Alupaty Demny (Ketua KPU Kab. Maluku Barat Daya)
2. Aner Leunufna
3. Kristiaan Talupoor

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XIX/2021:

Nasrullah

K. Termohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

Hidayat Kelilauw (Ketua KPU Kab. Seram Bagian Timur)

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

Difla Wiyani

M. Bawaslu Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Amran Bugis
2. Yordan Boro Bahhy
3. Baco Djabumir

N. Bawaslu Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Matheos Rehiraky
2. Engels K. Marcus
3. Jemris P. Yonas

O. Bawaslu Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Suparjo R. Rumakamar (Ketua Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur)
2. Rosna Sehwakay

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Anthoni Hatane
2. Laura Meydiana

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dodi L. K. Soselisa
2. Jonathan Kainama

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Charles B. Litaay
2. Aziz Mahulette

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Perkara 38/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Perkara 73/PHP.BUP-XIX/2021, dan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Perkara 117/PHP.BUP-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum persidangan kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruangan dalam keadaan membaca atau diam tetap harus menggunakan protokol kesehatan, antara lain tetap menggunakan masker. Kalau ada yang pakai face shield dan mau dibuka enggak apa-apa, tapi masker tetap kita gunakan.

Yang kedua, Para Pemohon kalau ada bukti tambahan bisa diserahkan sekarang, agar kami bisa memverifikasi dan selanjutnya nanti kita bisa sahkan sebelum sidang ini selesai. Ada yang ... atau sudah diserahkan? Dibawa? Atau enggak ada lagi? Enggak ada ya? Ada? Ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Baik, kemarin sudah (...)

3. KETUA: ASWANTO

Oke, hidungnya juga ditutup, Pak.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Oh, ya, baik.

Kemarin sudah coba komunikasi dan itu dari kami mungkin akan diserahkan pada sidang berikutnya, Yang Mulia. Jawaban.

5. KETUA: ASWANTO

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dan juga kepada Para Pihak yang mengikuti persidangan ini secara online, saya lihat kemarin tetap setia ini mulai dari awal KPU RI. Terima kasih, Pak. Pak Dewa ya, terima kasih sudah hadir. Demikian juga dari Bawaslu yang sempat hadir, Para Prinsipal-Prinsipal Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang mengikuti persidangan lewat online. Terima kasih, Anda sudah menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, untuk memandu persidangan ini, saya mohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia. Diperkenalkan Nomor 173/PHP.BUP-XIX/2021 dulu? Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, sori Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, ya Bapak ya? Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021. Oke Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 dulu. Bisa diatur sesuai dengan tempat duduknya, ya. Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 dulu.

Silakan perkenalkan siapa yang hadir? Namanya saja enggak usah yang lain-lain, istri dan anak enggak usah dikenalkan.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Salam sejahtera, salam. Kami Pihak Pemohon dalam Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 akan dihadiri oleh empat orang, dua secara daring dan dua Kuasa Hukum, yang hadir di sini.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipal hadir, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya, Prinsipal Timotius Kaidel nanti menghadiri secara daring, tapi kemungkinan belum connect.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apalagi?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Saya sendiri Fidelis Angwarmasse, S.H., kemudian Rekan saya di belakang Hendra Jamlaay.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

He em. Salah satu Rekan kami yang akan mengikuti daring Yohanis Romodi Ngurmetan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, daring?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi yang daring Prinsipal satu dan Kuasa Hukum satu.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Kuasa Hukum satu, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Kemudian 73/PHP.BUP-XIX/2021? Sori, ini nomornya enggak urut ini. Nomor kedua, Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021? Apa Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perkenalkan, Pak.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari Pemohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021, hadir pada pagi hari ini Kuasa Hukum dari Para Pemohon, saya sendiri Danu Hurmuja, S.H., dan Rekan saya tepat di belakang saya bernama Novi Manaban, S.H., kemudian hadir juga secara daring Prinsipal saya yaitu Bapak Arobi Kelian, S.Sos, Yang Mulia. Terima kasih.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang hadir Novi Manaban?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Novi Manaban.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Danu Hurmuja.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Danu Hurmuja, baik.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Daringnya Pak Arobi Kelian.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Terima kasih, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Arobi. Baik, Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Baik, Yang Mulia terima kasih. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kuasa Hukum atas nama Urbanus Mamu, S.H., M.H., Nomor Perkara 73/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir saya sendiri yang ikut daring Prinsipal dan Prof. Cahyadi. Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong, Pak, diulang, Pak, yang hadir.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Yang hadir Urbanus Mamu.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa hukum nomor berapa itu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kua ... Nomor urut berapa di surat kuasanya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Nomor 1, Yang Mulia, Nomor 01.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya? Nama Bapak siapa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Urbanus Mamu.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada di sini Nomor 1 itu. Surat kuasanya pinjam. Siapa satunya? Yang satunya siapa? Enggak ada, 1 set, ya, Bapak, yang hadir, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pinjam kuasanya ... surat kuasanya. Urbanus Mamu Nomor 3 Bapak di sini bukan Nomor 1. Nomor 1 Rasman.

Baik, silakan Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, ya. Yang Bapak, ya, menyampai ... oh, sebentar. Fidelis Angwarmasse, ya? Surat kuasa Bapak mana yang Bapak bawa coba, ada enggak?

47. KETUA: ASWANTO

Bapak di tempat saja nanti petugas kami yang datang. Tolong maskernya, Pak di ... yang benar pakai di hidung juga ditutupin.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak pun halaman yang kedua terbalik pula. Kami belum mendapat yang ada materainya, ya, Pak, yang ... sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? Yang sudah ada materai dan ada tanda tangannya. Kapan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Tadi.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Tadi, sekalian tadi.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya. Di dalam alat-alat buktinya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Barusan ini tadi?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang melalui ini tadi?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Tadi saya kira tadi pagi atau tadi malam. Ini tadi, kan karena diminta. Ini kami belum menerima yang ada materai dan tanda tangan kuasa. Tapi ini juga bukan secara khusus untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini. Ini yang Oktober ini untuk segala urusan ini termasuk untuk menghadap hakim, jaksa, polisi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu. Untuk menghadap bukan untuk mengajukan sengketa, ada enggak untuk mengajukan sengketa?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ada, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sengketa pemilu adanya tapi enggak secara khusus di Mahkamah Konstitusi, ya. Lain kali Bapak ... sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Belum.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum, ya. Jadi, kuasa itu harus surat kuasa khusus. Khusus itu apa? Khusus itu satu keperluan misalnya untuk mengajukan gugatan atau permohonan perselisihan sengketa dalam Perkara Pilkada Kepulauan Aru Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Baik.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu khusus. Ini karena ada cantolannya untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu, padahal udah Oktober yang lalu belum tentu.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini umum ini dan satu aslinya juga umum untuk perkara segala macam keperluan, jadi ini hari ini Saya beri apa ... toleransi untuk karena sudah ... tapi nanti sebaiknya untuk sidang yang datang Bapak membawa surat kuasa yang perbaiki ya dari prinsipal ke Para Kuasa Hukum. Bahwa ada di samping surat kuasa umum ini ada surat kuasa yang bersifat khusus, ya. Nanti diskusi dengan lawyer di luar itu banyak lawyer yang senior yang punya pengalaman yang bisa di ... diajak diskusi.

Baik, kemudian dari KPU silakan nomor urutnya yang nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 dulu. Nomor 73/PHP.BUP-XIX/ ya, tadi ini Pak ... 38/PHP.BUP-XIX/2021 dulu biar sesuai urutan ini.

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Kami dari Termohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Kepulauan Aru hadir di ruangan ini, Kami berdua. Saya selaku Kuasa Hukum Abdul Haji Talaohu, bersama Prinsipal Ketua KPU Aru Bapak Mustafa Darakay dan yang sedang di Hotel Mercure hadir secara daring rekan-rekan Anggota KPU Aru. Terima kasih, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat Kuasanya, ada?

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU

Ada, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke Petugas, ya. Kemudian 117/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, silakan. 117/PHP.BUP-XIX/2021

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera. Perkenalkan nama Saya Difla Wiyani, S. H, M. H. dalam hal ini Saya mewakili KPU Kabupaten Seram Bagian Timur hadir bersama Saya Kordinator Divisi Hukum Hidayat Kelilauw. Terima kasih, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seram Barat Daya, Bu?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI

Seram Bagian Timur.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, baik. Kemudian yang terakhir Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH

Terima kasih, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat Kuasa Ibu ada, ya? Serahkan Ibu sama Petugas.

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI

Ya, Surat Kuasanya ada, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan 73/PHP.BUP-XIX/2021.

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH

Perkara 73/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Hadir di persidangan ini Bapak Aner Leunufna, Anggota KPU Maluku Barat Daya dan didampingi oleh Saya sendiri Nasrullah Kuasa Hukum dan hadir secara online ada Kristiaan Talupoor Anggota KPU dan Jacob Alupaty Demny Ketua KPU Maluku Barat Daya. Demikian, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat Kuasanya, ada?

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH

Izin, Yang Mulia Surat Kuasa masih diproses oleh Ketua dan akan disusul kemudian. Terima kasih.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi yang di Mahkamah Konstitusi juga belum ada?

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH

Belum, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum bisa Anda duduk di situ, belum ada standing-nya. Komisionernya Ketua atau Anggota?

85. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Anggota.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada Surat Tugas? Saudara punya Surat Tugas?

87. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Ada, Yang Mulia tapi belum (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa bukti Kami bisa melihat Anda Komisioner? Supaya bisa duduk di depan situ, menggantikan Kuasa Hukum ... bukan menggantikan, memang belum punya. Dilihat di sini Pak, ambil. Bapak duduk di belakang dulu, ya, Pak karena belum ada Kuasa Hukum ... belum ada Surat Kuasa. Ini satu KPU? Eh ... satu KPU, ya? Dengan 73/PHP.BUP-XIX/2021? Surat ... 38/PHP.BUP-XIX/2021, tidak?

89. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Beda, Ketua.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

91. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Beda, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Beda.

Bawa sini Mas bukti apa yang bisa menunjukkan bahwa Bapak ini Komisioner dari KPU Nomor ... ya, terus duduknya di depan. Bapak di depan Pak. Ya, enggak ada yang lewat daring?

93. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Ada, Yang Mulia. Kristiaan Anggota KPU.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner?

95. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Anggota.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara dari yang ... yang Ketua KPU hadir, gak lewat daring?

97. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Ketua KPU juga hadir lewat daring, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa Namanya? Coba di-zoom Pak ... IT. Pak siapa yang hadir dari Komisi Pemilihan Umum? Komisi Pemilihan Umum mana Bapak?

99. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maluku Barat Daya?

101. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Ada Ketua yang hadir melalui daring, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana orangnya?

103. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Di tengah, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di tengah itu Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kok ditunjuk-tunjuk nanti enggak ... Barat Daya. Mana? Siapa namanya Pak?

105. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Jacob Alupaty Demny, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Jacob mana Pak Jacob? Jacob? Enggak ada juga.

107. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Yang sementara berdiri itu, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berdiri? Ya. Pak Jacob betul Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya? Suaranya enggak bisa, ya? Betul, Pak? Enggak bisa dikeluarkan suaranya bagian IT? Enggak ada suaranya.

109. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY

Izin, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya?

111. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY

Benar, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang hadir di persidangan komisioner Saudara namanya siapa?

113. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY

Saudara Aner Leunufna Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Barat Daya, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Koordinator Divisi Teknis?

115. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY

Teknis. Benar, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya Bapak?

117. TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: ANER LEUNUFNA

Aner Leunufna, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, oke Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Mahkamah ... nanti lain kali kalau bukan Ketua atau Ketua pun sesungguhnya pakai surat tugas. Apalagi menguasai orang luar. Kalau me-hire dari luar harus ada surat kuasa. Kalau internal cukup surat tugas, ya? Termasuk Bawaslu itu nanti diperhatikan, ya. Karena kami tidak mau ini sengketa-sengketa yang di dalamnya adalah sangat krusial tarik menarik kepentingan, sehingga kalau kami menerima orang atau pihak yang tidak jelas, ya, kami akan apa ... strict dan kami akan berlakukan dengan ketat. Nanti ya Pak. Jadi kalau memang mau memberi kuasa kepada lawyer/advokat, silakan. Itu hak privat Saudara hak ... kami tidak bisa menghalangi. Tapi harus dilapisi dengan Surat Kuasa. Baik, seperti Bawaslu ini tidak pernah ada yang memberi kuasa kepada ... ke advokat, ke orang luar, sehingga cukup surat tugas. Tapi kalau nanti akan memberikan kuasa kepada orang luar, baik advokat maupun bukan karena di Mahkamah Konstitusi ini tidak seperti di peradilan umum, harus advokat yang menjadi kuasa hukum. Kalau di Mahkamah Konstitusi, boleh orang yang dipandang mampu, tapi kalau orang luar tetap harus Surat Kuasa. Kalau internal, baru surat tugas. Dari Bawaslu Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

119. BAWASLU NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: YORDAN BORO BAHHY

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami yang hadir pada kesempatan sidang ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru. Saya atas nama Yordan Boro Bahhy, dan rekan saya atas nama Baco Djabumir. Hadir juga melalui daring, Amran Bugis Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

121. BAWASLU NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: YORDAN BORO BAHHY

Dengan Bawaslu Maluku. Terima kasih, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada surat tugasnya Pak?

123. BAWASLU NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: YORDAN BORO BAHHY

Ada, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diserahkan ke petugas, ya.

125. BAWASLU NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: YORDAN BORO BAHHY

Baik, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

117/PHP.BUP-XIX/2021 silakan.

127. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Saya Suparjo R Rumakamar selaku Ketua hadir melalui daring Saudara Rosna Sehwakay selaku kordiv sumber daya manusia dan didampingi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku. Terima kasih, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada surat tugasnya, Pak?

129. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR

Ada, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke petugas, ya. Perkara 73/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

131. BAWASLU NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: MATHEOS REHIRAKY

Izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang hadir, saya Matheos Rehiraky dan bersama dengan rekan saya Engels Marcus. Hadir secara daring, Jemris Yonas. Terima kasih, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Surat Tugas diserahkan ke petugas. Baik, ya, untuk kesempatan pertama diberikan kepada Kuasa Hukum Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021. Sampaikan pokok-pokok permohonan Saudara dalam waktu kurang lebih 15 menit. Silahkan. Sudah punya resumanya, belum? Belum, kan? Mesti ... lain kali beracara di MK harus menyiapkan resume karena ya tidak hanya di MK, di peradilan umum pun juga. Kalau diminta menyampaikan pokok-pokok gugatan ya sudah siap dengan narasi resume. Bapak juga begitu nanti, termasuk tadi ya surat kuasa khusus. Bapak sudah pernah beracara di pengadilan negeri, belum? Itu juga surat kuasa khusus bukan umum begini. Silakan.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan permohonan pembatalan Perkara Nomor 30 sebagaimana yang telah disampaikan, kami akan membaca pokok-pokoknya saja.

Bahwa yang pertama, Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan Pemohon menyampaikan uraian-uraian permohonan sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan.
2. Kedudukan Legal Standing Pemohon mohon dianggap dibacakan.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, lanjut.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

III. Tenggang waktu pengajuan permohonan, halaman 9 mohon dianggap dibacakan.

IV. Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/pl.02.06-kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 diumumkan pada hari Rabu, tertanggal 16 Desember 2002 telah menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1, Johan Gonga Muin Sogalrei dengan perolehan suara 23.473. Pasangan Nomor Urut 2, Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, S.E. dengan perolehan suara 23.498 dengan total suara sah 50.971.

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru hari Rabu, 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62 sebagaimana telah kami sampaikan di depan, mohon dianggap dibacakan.

Berikutnya bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal mulai dari proses pembuatan daftar pemilihan tetap, proses kampanye, dan masa tenang saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten sebagaimana satu ... sebagai satu rangkaian kecurangan yang saling berkait.

a. Adanya upaya penghilangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih.

Kami langsung pada poin 1. Pemohon secara sengaja membiarkan adanya 2.775 pemilih ganda. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2009 yang otomatis menjadi daftar pemilih sementara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, sehingga

menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, namun pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 namanya tidak terdaftar dalam DPT.

- b. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka mengajukan keberatan atas penetapan DPT oleh Termohon yang terdapat data pemilih ganda.
- c. Bahwa atas keberatan tersebut di atas, Termohon mengundang Pemohon guna meminta klarifikasi dan keberatan Pemohon dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Gakkumdu, dan dalam pertemuan tersebut terungkap fakta dugaan DPT ganda benar adanya diperkuat dengan pengakuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Pemohon menemukan 2 rekaman pembicaraan antara Termohon dalam hal ini Bapak Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru dimana Termohon dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan dengan ancaman pemberhentian terhadap anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk menandatangani hasil pleno kabupaten tentang penetapan DPT yang senyatanya berbeda dengan hasil pleno penetapan DPT tingkat kecamatan. Perbedaan dimaksud dimana jumlah pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di DPT kabupaten tiba-tiba membengkak jauh melebihi DPT yang telah ditetapkan di tingkat PPK sebelumnya.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara, ini permohonan perbaikan Saudara sudah disampaikan terlambat, ya?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena apa?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Karena sinyal di sana, kita baru masukkan tanggal (...)

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sinyalnya kenapa di ... masa sinyalnya bermasalah.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Tanggal 4.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, tapi karena ini juga Termohon 38/PHP.BUP-XIX/2021 mana? Dapat dua-duanya Pak, ya? Dapat permohonan awal dan perbaikan juga? Kuasa Hukum juga tidak tahu, Bapak?

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU

Siap, Yang Mulia. Yang diserahkan hanya yang perbaikan.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perbaikan?

145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, jadi malah perbaikannya diserahkan. Dari Mahkamah dua-duanya biasanya.

147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU

Satu saja yang masuk ke kami, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kami cek, ya, karena baik yang permohonan awal dan ini kan ada catatan di kami permohonan terlambat. Baik, kalau begitu Saudara tidak bisa menyimak walaupun ini dikembalikan atau ada permohonan awal yang dipresentasikan, Anda enggak bisa menyimak karena enggak punya data cross-nya, ya.

149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU

Koreksi, Yang Mulia. Ternyata 2.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hah?

151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU

2, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 kan, makanya. Makanya kalau jadi lawyer itu harus diskusi banyak dengan prinsipal, prinsipal juga tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyikan nanti tidak bisa all out. Kuasa Hukum itu membela kepentingan prinsipal kalau ada yang tidak diterusterangkan.

Pak, ini karena terlambat, silakan dilanjutkan. Tapi nanti kalau misalnya ada keberatan dari Pihak Termohon, itu haknya dia, ya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya, baik.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, karena Bapak nanti Termohon bisa merespons semuanya, ya, Pak. Baik yang pendahuluan maupun yang terlambat, ya. Karena memang Mahkamah tidak bisa membatasi sebenarnya, tapi hukum acara sudah mengatur bahwa yang terlambat itu sesungguhnya itu harus

dikesampingkan dan kembali kepada permohonan awal, tapi karena Pemohon tetap mau melanjutkan yang pertama ... yang terlambat?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Yang perbaiki, ya.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang perbaiki, silakan. Nanti terserah, ya, bagaimana respons Pihak Termohon, ya.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Baik.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, tinggal 5 menit waktunya.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Baik, kami lanjutkan. Langsung pada angka 2 saja, Yang Mulia.

Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT, selanjutnya dianggap dibacakan sebagaimana tersebut dalam permohonan.

Berikut Nomor 3, halaman 14. Bahwa Termohon tidak menghapus DPT ganda, namun mengubah DPT.

Berikutnya angka 4, halaman 17, Yang Mulia. Termohon sengaja tidak menyampaikan Formulir C Pemberitahuan KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Lanjut Nomor 5. DPT ganda berakibat pada satu orang yang terdaftar dalam DPT mendapatkan 2 bahkan lebih lembaran Formulir Model C Pemberitahuan KWK (ucapan tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan.

Nomor 6. Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada pemilih tentang penggunaan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan (suket).

Berikutnya Nomor 7. Tentang upaya penghilangan hak secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon.

Kami lanjutkan pada huruf d, halaman 19. Adanya penggelembungan jumlah suara pada DPTb, ininya dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan ke halaman 35, Yang Mulia. C. Kartu Tanda Penduduk yang dicetak pasca pemilihan. Mohon maaf, Yang Mulia, kami mengajukan renvoi, yang tertulis dalam permohonan pasca diubah menjadi pra. Karena yang dimaksudkan kami pra pemilihan, Yang Mulia. Pada halaman 35.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di mana itu? Pasca ini pra maksudnya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pra pemilihan?

163. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Pra pemilihan. Ya, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Lanjutkan.

165. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Kami lanjutkan ke halaman 37 huruf d. Adanya keterlibatan aparat sipil negara dan aparat desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, yang cukup mempengaruhi pemilih, serta berpihak kepada salah satu calon. Berikutnya.

Nomor 1. Adanya intimidasi untuk mempengaruhi pemilih serta berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selanjutnya kami anggap dibacakan. Kami lanjutkan pada nomor 2. Keterlibatan camat dan kepala desa yang cukup mempengaruhi pemilih, serta berpihak pada salah satu calon.

Berikutnya halaman 38 huruf e. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, serta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon.

1. Pelanggaran oleh Termohon yang tidak melakukan pemutaran data, mengakibatkan daftar pemilih tetap ganda. Selanjutnya dianggap dibacakan.
2. Pelanggaran oleh anggota KPPS, pada TPS-7 ... TPS-37 Kelurahan Siwalima mencoblos sebanyak 5 kali. Selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya, halaman 39.
3. Pelanggaran oleh ketua dan anggota KPPS, pada TPS-35 Kelurahan Siwalima. Berikutnya.
4. Pelanggaran oleh Ketua KPPS pada TPS-3 Kelurahan Galaydubu. Kami lanjutkan pada halaman 40, Yang Mulia huruf f.

Pencoblosan oleh satu orang atau satu pemilih lebih dari satu kali. Di satu tempat pemungutan suara atau TPS dan/atau tempat pemungutan suara berbeda yang mempengaruhi jumlah perolehan suara. Isinya dianggap dibacakan. Kami lanjutkan ke halaman 41. Petitum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Aru 2020 ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 16 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kepada Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, serta Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten atau kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Nomor 4,5, dan 6 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

167. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Cukup. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Demikian, untuk Pemohon, Termohon, KPU, dan/atau Kuasa Hukumnya dan Bawaslu Kepulauan Aru. Nanti pada persidangan yang akan datang, nanti akan Mahkamah sampaikan jadwal berikutnya. Giliran Saudara-Saudara untuk menyampaikan jawaban untuk KPU dan penjelasan keterangan dari Bawaslu, berkaitan apa yang didalilkan oleh Pemohon ini. Ini ada 7 cluster besar, A sampai F, ya. Yang ganda saja ribuan, di 2.708, luar biasa. Nanti dijawab benar apa tidak itu? Dan lain-lain juga yang didalilkan dijawab, Pak. Kemudian, Bawaslu menerangkan, menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya seperti apa. Kemudian dalam perkara ini juga mengajukan sebagai Pihak Terkait dari Pasangan Johan Gongga dan Muin Sogalrey. Mana Kuasa Hukumnya? Berdiri, Pak. Saudara dari mana? Dari sana juga atau kah dari Jakarta? Jakarta. Baik, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan untuk menerima permohonan sebagai Pihak Terkait.

Oleh karena itu, nanti ketetapan bisa diambil di Panitera kami dan selanjutnya pada persidangan yang akan datang untuk semuanya ini, semua pihak termasuk Pihak Terkait.

Persidangan akan dibuka kembali hari Senin, tanggal 8 Februari ... Senin, 8 Februari 2021, pukul 08.00 WIB. Bukan waktu bagian Kepulauan Aru, ya, Pak. Supaya nanti tidak terlalu awal sampai di sini.

Untuk Pihak Terkait nanti Surat Kuasa diserahkan juga sambil mengambil ketetapan nanti. Sudah ada, Pak. Ada pertanyaan? Sebentar ... sebentar.

Pemberitahuan untuk sidang tadi sekaligus pemberitahuan resmi untuk sidang yang akan datang. Jadi, tidak lagi harus menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Ini sudah merupakan panggilan yang sah sehingga misalnya nanti Mahkamah Konstitusi memanggil kembali atau memberitahukan kembali, tapi tidak sampai ke Bapak-Bapak semua, tidak ada alasan untuk tidak hadir di persidangan pada jadwal yang sudah ditentukan tadi. Kalau tidak hadir, nanti kami akan menganggap Ibu/Bapak sekalian melepaskan hak atau kepentingannya untuk perkara ini. Jelas, ya? Ada, Pak, pertanyaan apa, Pak?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ada, Yang Mulia. Sehubungan dengan Surat Kuasa tadi, yang kami tanyakan bahwa apakah Surat Kuasa yang kami sampaikan

berikutnya atau perubahan, untuk tanggalnya apakah disesuaikan pada untuk ... dengan permohonan pertama tanggal 18 Desember?

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, Pak, apa adanya saja.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya, baik.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena itu sifatnya menyempurnakan.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak sudah punya kuasa tapi kuasa Bapak ini kuasa umum. Sejak bulan Oktober yang lalu yang sebenarnya kuasa untuk kemana-mana, bukan secara khusus beracara di Mahkamah Konstitusi. Untung ada narasinya bahwa mengajukan gugatan berkaitan dengan pemilihan ini, kalau tidak tadi Bapak tidak bisa saya beri standing untuk membacakan permohonan.

Selebihnya saya serahkan ke Yang Mulia yang lain mungkin ada klarifikasi atau pertanyaan.

175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Soal perubahan kuasa tadi dari Pemohon, ya, kalau sudah di bulan Januari ada undang-undang materai yang baru. Kalau waktu masih Desember masih pakai materai 6000, ya. Jadi, karena ini untuk perubahan jadi harus disesuaikan dengan materai yang baru. Terima kasih, saya itu saja.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Baik, Yang Mulia.

177. KETUA: ASWANTO

Baik, dari saya cukup. Kita sahkan dulu bukti. Perkara Nomor 38 ini berdasarkan daftar bukti, Anda punya bukti P-1 Anda ... P-1 sampai dengan P-16, ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya, Yang Mulia.

179. KETUA: ASWANTO

Nah, ada catatan P-8, P-9, P-10, dicatat, ya. Biar nanti ini ... saya ulangi, P-8, P-9, P-10, P-12.2, dan P-15 ada di daftar alat bukti, tetapi tidak ada fisiknya, alat buktinya enggak ada. Nanti dilengkapi, ya. Sudah dicatat, Pak, yang tidak ada fisiknya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Sudah, sudah.

181. KETUA: ASWANTO

Nanti dilengkapi, ya. Kemudian, soft copy permohonan Saudara juga belum dimasukkan, ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Sekalian nanti, Yang Mulia. Sudah disiapkan semua.

183. KETUA: ASWANTO

Oh, sekalian dimasukkan. Kan termasuk juga soft copy daftar bukti.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE

Ya, sudah, Yang Mulia, sudah kami siapkan semua.

185. KETUA: ASWANTO

Ya, di ... dimasukkan, ya. Baik, dengan demikian kita sahkan yang sudah ada P-1 sampai P-16 di luar atau kecuali yang belum ada fisiknya yaitu P-8, P-9, P-10, P-12.2, dan P-15.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 sudah cukup, ya. Kalau mau meninggalkan tempat mungkin lebih baik karena sirkulasi udara kita ini memang untuk apa ... proses lebih bagus kalau kita lebih mengurangi beban ada kerumunan. Silakan, boleh semuanya Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Silakan, Pak, keluar, boleh keluar. Sudah cukup, Pak, jadi sidang yang akan datang tadi sudah jelas, kan? Ya, sudah enggak ... silakan, silakan.

Selanjutnya Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, ya, supaya urut tadi saya agak confuse dengan ... Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 dulu. Dari Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 terus Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan, Pak. Dalam waktu yang sama, 15 menit.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bacakan pokok-pokok permohonan.

Hal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3270 dianggap dibacakan.

Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, permohonan prinsipal Nikolas Jhohan Kilikily sebagai Calon Bupati dan Desianus Orno sebagai Wakil Bupati.

- I. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan
- III. Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan
- IV. Pokok Permohonan

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tertanggal 16 Desember 2020.

Bahwa pada saat Pleno KPU Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi maka ditetapkan:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 13.244, Pasangan Calon Nomor Urut 2=28.210, Pasangan Calon Nomor Urut 3=5.156.

Bahwa permohonan sebagai Paslon Nomor Urut 1 dinyatakan memperoleh suara 13.244 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya atau Petahana memperoleh suara 28.210 dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara 5.156, sebagaimana rincian pada tabel di atas.

Bahwa perolehan suara tersebut di atas terdapat selisih peolehan suara 14.966 ... 14.966 yang ditetapkan Termohon adalah tidak dapat diterima karena diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistemasi, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Termohon in casu KPU Maluku Barat Daya dengan cara melibatkan Aparatur Sipil Negara dari Tingkat Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindag, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Desa, ASN, Sekretaris Camat. Bahwa selain itu terdapat pembagian uang di sejumlah tempat secara merata dan pembagian pakaian seragam sekolah, pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, teh, susu, gula pasir, tepung terigu.

Bahwa berdasarkan Laporan Model A.3 dan rekaman percakapan Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya terungkap hal-hal sebagai berikut.

Di Desa Klis di Kecamatan Moa, percakapan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya pertemuan yang dilakukan bersama staf Desa Klis bersama dengan pemangku adat dan para guru-guru Desa Klis di Desa Siota, Desa Nyama. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Rabu pukul 16.00 WIT kurang lebih sampai pukul 18.00 WIT tanggal 2 Desember 2020. Bahwa tujuan pertemuan dilakukan dengan Kepala Desa Klis dengan membagi insentif kepada staf desa bersama saniri (tua-tua), mata rumah dan kepal soa (ketua kumpulan beberapa marga).

Bahwa dalam pertemuan tersebut Saudara Sekda menggunakan kesempatan untuk membicarakan kepentingan politik untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2

Bahwa selain itu juga terjadi intimidasi dan janji kepada masyarakat desa, jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 2. Program-program tidak akan didapatkan baik yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan.

Bahwa berdasarkan laporan Formulir Model A.3 tertangkap tangan pembagian bantuan sembako yang dilakukan pada masa tenang pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 10.02 WIT, terlapor Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) laporan yang sebagaimana dimaksud sedang dalam proses di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat

Daya. Bahwa bukti berupa daftar nama penerima bantuan sebanyak 250 orang. Bukti P-27.

Bahwa berdasarkan Laporan Model A.3 tentang intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor dinas perhubungan MBD yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dua orang staf perhubungan pada tanggal 7 Desember 2020 dan 8 Desember 2020 dengan tujuan mengarahkan para honorer memilih Paslon Nomor Urut 2. Jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 2 maka para honorer tidak akan dimasukkan lagi ke dalam SK. Honorer yang akan dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2020 mendatang.

Bahwa adanya keterlibatan pegawai Sekretaris Camat Pulau-Pulau Babar bersama Pak Demi Imuli (pegawai camat) dikawal dua orang polisi pakai motor dan satu mobil tantara pada malam hari pukul 22.00, tanggal 8 Desember 2020. Mereka berkunjung ke posko-posko Calon Nomor Urut 2 di sebuah desa, Kecamatan Bula Barat.

Bahwa berdasarkan laporan model A3 keterlibatan ASN dan Kepala Desa pada penjemputan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan pada hari Rabu, 11 November 2020. Laporan tersebut sampai saat ini belum kejelasan ... ada kejelasan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahwa dari skema politisi ... izin, Yang Mulia, untuk skemanya dianggap telah dibacakan.

Bahwa selain itu di Kecamatan Tapa terjadi pembagian seragam sekolah SD sebelum hari pencoblosan yang dilakukan oleh Saudara Mirau pengusaha di Tepat. Selain itu juga, Saudara Mirau juga menjanjikan dilakukan perbaikan rumah bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang.

Bahwa berdasarkan postingan facebook atas nama Jeff Pay dalam posting-an-nya mengatakan ... mengatakan laporan kegiatan kerja tim pemenang BTN-Ari Pasangan Calon Nomor Urut 2 petahana Kecamatan Hirea kepada Bupati terpilih, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 terungkap foto di rumah kediaman Bupati, yaitu sekretaris camat Kecamatan Donahera dan Kepala Desa Rumkisar serta Kepala Desa Regoha. Para ASN ini datang melapor ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa tugas mereka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah selesai.

Bahwa dengan adanya posting-an para sekcam dan para kades yang datang melapor ke Bupati atau Pasangan Calon petahana tersebut semakin membuat terang benderang keterlibatan ASN secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Bahwa berdasarkan postingan di media sosial facebook atas nama Marchello Oliver mengatakan sebelum Pilkada MBD selesai, sektor pada bagian umum sekretaris kantor bupati MBD sudah menentukan siapa yang menang di Pilkada MPD. "Nomor Urut 02 itu gampang kepilihan, lanjutkan-lanjutkan."

Bahwa berdasarkan 2 lembaga survei, yaitu lembaga survei research strategi badan nusantara dan lembaga survei parameter konsultindo, dalam presentasinya mengatakan bahwa Pemohon pasti akan menang dalam pilkada. Selain itu lembaga survei parameter konsultindo juga mempresentasikan netralitas ASN dan hasil survei mengatakan tidak yakin ASN bisa netral sebanyak 59%, yang yakin 29%, tidak tahu 10%.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yosep Letty di Kecamatan Damer, Desa Wulur dalam rekaman video mengatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya membagikan uang dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Selain itu berdasarkan pernyataan Saksi Harun Letty mengatakan mengetahui Kepala Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya membagikan uang kepada masyarakat Ilir, Desa Wulur yang bekerja jembatan dan mengarahkan untuk memilih Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dengan adanya keterlibatan ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya yang mana sebagai penyelenggara dan seharusnya menjadi wasit tetapi ikut serta menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka patut diduga terjadi persengkongkolan yang luar biasa antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tindakan ini sudah harus dianggap pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan keterangan Matheus A. Mabaha pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Pulau Lirang, Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi kegiatan pembagian bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp1.800.000,00.

Bahwa berdasarkan pernyataan Kilyon Yosri Maulafak bertempat di Ilwaki Kecamatan Wetar tanggal 7 Desember 2020, pukul 20.00 WIT. Ada pengumuman untuk pembagian bansos pada tanggal 8 Desember 2020, pukul 10.00 pagi yang diumumkan oleh Kepala Urusan Umum pembagian bansos dilakukan pada masa tenang.

Bahwa berdasarkan pernyataan Benjamin Lelaudan bukti foto-foto ada pembagian sembako dilakukan oleh camat Pulau Wet ... Pulau Lapor dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan keterangan Korneles Rumaketi telah terjadi intimidasi dan ancaman dari Camat Wetar kepada masyarakat Desa Kota Kecil. Bahwa berdasarkan pernyataan Rivan Lirmamana keterlibatan Kepala Desa secara masif dilakukan di beberapa desa Kecamatan Leti dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan pernyataan Leonas Paknia Niwewan bertempat di Desa Wulur Kecamatan Damer telah terjadi intimidasi

terhadap saksi di kantor Camat Damer dan dilakukan oleh Camat Damer dengan tujuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dari fakta-fakta laporan ke Panwas yang ... yang tentang adanya pelanggaran dilakukan oleh ASN sekda, kepala dinas camat, dan kepala desa telah membuktikan kalau Pilkada di Maluku Barat Daya bukan hanya merugikan Pemohon, tetapi telah merugikan negara. Dengan mengkerdilkan negara melalui perbuatan-perbuatan yang bertentangan dan dengan peraturan perundang-undangan melalui politik uang, barang, sembako serta intimidasi. Maka siapa pun akan melawan petahana pasti tidak akan mampu menang. Jika hanya mengandalkan visi dan misi kedekatan emosional masyarakat.

Bahwa politik uang dan barang serta politik politisasi birokrasi dan keterlibatan Ketua KPUD Maluku Barat Daya merupakan satu rangkaian kerjasama yang ... kerjasama untuk memenangkan calon petahana. Satu rangkaian ini sudah barang tentu akan diikuti dengan pembagian uang, sembako, BLT, janji-janji program pemerintah, dan intimidasi. Hal tersebut terungkap dalam video-video serta rekaman dan pengakuan warga.

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup hanya melibatkan peran serta masyarakat dalam memilih calon pemimpin, tetapi kedaulatan rakyat atas pilihannya sangat ditentukan oleh KPU yang mampu bersikap jujur dan adil. Maka, hak kita sebagai warga negara dalam mengikuti pemilihan dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam memastikan bahwa pilkada adalah wujud kedaulatan rakyat, bukan alat bagi praktik-praktik manipulasi.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, selebihnya dianggap dibacakan, Pak.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa langsung Petitum. Karena selebihnya bukan lagi fakta hanya semacam tambahan, wawasan atau (...)

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Petitum, Pak.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Ini sudah mau selesai ini, Yang Mulia. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara dan Ketua KPU Maluku Barat Daya untuk memenangkan Pason Petahana telah merusak keadilan dan demokrasi.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 320. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan pemilihan ulang pada kecamatan-kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel 2.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Urbanus Mamu, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia. Sekian.

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Enggak ada rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu? Tidak ada ya, Pak?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Untuk DKPP dalam proses, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalam proses. Tapi kalau rekomendasi ketika berproses di kontestasi pemilihan, tidak ada ya?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Untuk di Bawaslu RI kita sudah masukkan dua surat tetapi sampai saat ini belum ada jawaban.

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Termohon Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, nanti direspon, dijawab melalui jawaban apa yang didalilkan oleh Pomohon tadi. Demikian juga Bawaslu, nanti dijelaskan apa yang terjadi yang sebenarnya.

Kemudian dalam permohonan ini ada Pihak Terkait Nomor 3 dari Benyamin Thomas. Oh, ya. Ini Pak Benyamin ini, ST atau SH? ST, Sarjana Teknik? Oh. Di situ ada dua ... apa ... salah ketik, nanti dicek ya, Pak? ST, Sarjana Teknik, ya?

Oke. Permohonan dari Pak Benyamin Thomas Noach, ini bukan Noach itu ya, ST dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily. Permohonannya diterima untuk menjadi Pihak Terkait, nanti supaya bergabung pada persidangan yang akan dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, pukul 08.00 WIB. Tulis, Pak, nanti acaranya adalah menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Kemudian membawa bukti-bukti yang diserahkan pada awal persidangan kalau memang ada bukti yang akan diserahkan. Pemberitahuan ini juga bagian dari panggilan sidang untuk jadwal yang telah ditentukan tersebut dan merupakan pemberitahuan resmi, sah, sehingga ketika nanti pada jadwal tersebut seandainya Mahkamah tidak menyampaikan ... tidak ... ada panggilan yang tidak sampai ke Saudara-Saudara, maka tidak ada alasan untuk tidak hadir.

Baik, kemudian saya kembalikan ke Pak Ketua Panel dan Pak Daniel, mungkin ada sesuatu yang akan di (...)

201. HAKIM KETUA: ASWANTO.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel, ada klarifikasi?

202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon, ini saya mau konfirmasi, Prinsipal Anda Pak Desianus Orno, ya. Ini di dalam identitasnya adalah pegawai negeri, apakah masih pegawai negeri atau sudah mundur?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia, sudah mundur. Cuma karena KTP itu belum diubah, jadi tetap kita pakai berdasarkan KTP, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Ini soalnya tertulis di sini masih pegawai negeri. Kemudian Pihak Terkait ini tadi saya cermati dalam permohonan, ini juga penulisan nama tadi sudah diklarifikasi oleh Yang Mulia soal gelar itu dan juga di sini untuk menanggapi permohonan dari Pak Nikolas, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia.

206. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi tertulis di sini Nikalas. Ini nama ini sangat penting dalam beracara, ya, nanti tolong dicermati Nikolas atau Nikalas? Hanya itu saja (...)

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Nikolas, Yang Mulia.

208. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gimana?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Nikolas, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, soalnya tertulis di sini Nikalas. Coba dicermati di dalam permohonan ke MK tanggal 18 Januari. Yang halaman depannya, ya. Baik, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

211. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan dulu alat bukti untuk Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan daftar alat bukti Anda memiliki Bukti P-1 sampai dengan P-53, betul ya?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Benar, Yang Mulia.

213. KETUA: ASWANTO

Baik, ada beberapa catatan. Pertama, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-19, P-44 itu belum ada buktinya, belum ada bukti fisik, ya, belum diserahkan. Kemudian untuk P-15 antara bukti fisik dengan daftar alat bukti itu tidak sinkron, ya, tidak sesuai, lain yang ada di daftar alat bukti, bukti fisiknya lain, gitu ya. Tolong nanti disinkronkan berhubungan langsung atau berkomunikasi dengan kami melalui bagian Kepaniteraan, ya.

Kemudian soft file permohonan awal juga belum masuk, ya, soft file-nya belum nanti dimasukkan. Kemudian soft file perbaikan permohonan juga belum masuk, demikian juga dengan daftar alat bukti soft file-nya sampai sekarang belum kami terima, ya. Diserahkan dalam bentuk word, ya. Dipahami?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia. Izin mohon bicara, Yang Mulia. Bukti, kami sudah masukkan, Yang Mulia. Yang disebutkan oleh Yang Mulia secara fisik waktu itu di-cross-check sama Panitera langsung, jadi 1 asli, 2

fotokopi. Semua sudah dileges, Yang Mulia. Menyangkut soft copy juga kami serahkan dalam bentuk flash yang dileges, kertasnya dileges kami serahkan juga, Yang Mulia. Tapi kalau memang (...)

215. KETUA: ASWANTO

Ya, kami sudah ... apa namanya ... verifikasi dan ternyata hasil verifikasi belum ketemu, ya, kalau Anda merasa sudah memasukkan tetapi hasil verifikasi belum kami temukan nanti akan kami cari kembali, tetapi untuk saat ini kita belum bisa mensahkan yang bermasalah itu.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia.

217. KETUA: ASWANTO

P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-19, P-44, dan P-15 itu belum kita sahkan, ya.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia.

219. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan bukti Saudara dulu P-1 sampai P-55, kecuali yang masih bermasalah itu.

KETUK PALU 1X

Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk 73/PHP.BUP-XIX/2021 mungkin sudah selesai, ya. Ini Pemohon dan Pihak Terkait yang kiri-kiri ini masih keluarga, ya, sebenarnya atau hanya satu daerah?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Yang Mulia, saya kebetulan orang Flores, jadi saya tidak ... tetapi kalau dari marga biasanya masih satu keluarga, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Enggak, artinya Anda kan diberi kuasa meskipun beda daerah, hubungan hukum kan kemudian muncul bisa kan diapa ... bicarakan dari hati ke hati untuk penyelesaian secara ... di MK juga sama di peradilan umum, Pak, perkara itu di tengah kalau ada perdamaian selesai, tutup tidak usah dilanjutkan, kan bisa, dan dengan penyelesaian semua akan win-win solution dan akan menjadikan daerah itu lebih kondusif ketika ... daripada kalau perkara itu berlanjut terus sampai ada putusan. Itu hanya apa ... message saja, silakan nanti kan sesama lawyer bisa saling diskusi atau apa ... ini kalau pilihan-pilihan saja, Pak, oke.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan, baik Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Sambil anu ... bisa dipersiapkan untuk 117/PHP.BUP-XIX/2021. Siapa yang akan menyampaikan, Pak?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Baik, Yang Mulia. Untuk pertama, saya Danu Hurmuja yang akan menyampaikan terlebih dahulu.

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, waktunya sama 15 menit.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6 di Jakarta Pusat.

Perihal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

Pertama. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang kedua, kedudukan hukum. Mohon dianggap dibacakan. Yang ketiga, tenggat waktu pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya yang keempat. Pokok permohonan.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh perolehan suaranya 31.100. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pemohon perolehan suara 20.939. Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara 15.555. Total suara sah 67.594. (Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan sebanyak 20.939 suara). Alasan penolakan.

2. Bahwa Pemohon menolak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon dikarenakan dalam rangkaian proses pemilihannya syarat dengan pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Politik uang. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan dengan money politics yang dilepas secara TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak Kuasa Hukum.

229. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Baik, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini catatan kami permohonan yang perbaikan juga terlambat ya diserahkan.

231. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Oh, sudah, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal 5 Januari.

**233. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:
DANU HURMUJA**

Sudah, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya terlambat diserahkan?

**235. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:
DANU HURMUJA**

Enggak, ini sudah ada permohonan yang awal di Desember, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang Anda bacakan yang mana?

**237. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:
DANU HURMUJA**

Yang perbaikan.

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu yang saya katakan.

**239. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:
DANU HURMUJA**

Ya, baik, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang saya katakan itu bahwa yang Anda bacakan itu adalah permohonan yang terlambat.

**241. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:
DANU HURMUJA**

Ya, baik, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti direspons dari KPU dan Bawaslu terserah apa Anda terima sebagai KPU yang baik kemudian menerima kan enggak dilarang. Atau keberatan juga boleh karena memang PMK-nya atau ketentuan undang-undangnya ... nah, silakan semua ... dianu ... direspons. Silakan, Pak, dilanjutkan, Pak. Bapak tetap dengan yang perbaikan yang dibacakan?

**243. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:
DANU HURMUJA**

Ya, perbaikan, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

**245. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:
DANU HURMUJA**

Karena tidak mengubah substansi. In casu penyerahan ... izin, lanjutkan, Yang Mulia.

In casu penyerahan aparat sipil negara yang dilakukan oleh bupati dan kepala dinas pendidikan yang terjadi di 11 kecamatan. Dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, adapun sebaran TSM tersebut terjadi di.

1. Kecamatan Gorom
2. Kecamatan Gorom Timur
3. Kecamatan Bula
4. Kecamatan Siritauan Wida Timur
5. Kecamatan Teluk Waru
6. Kecamatan Wakate
7. Kecamatan Seram Timur
8. Kecamatan Kilmury
9. Kecamatan Bula Barat
10. Kecamatan Tutuk Tolu
11. Dan Kecamatan Pulau Panjang.

Poin b. Angka partisipasi pemilih DPTb 100% yang tidak wajar terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Bula.

Dua. Bahwa berdasarkan Model D Kejadian Khusus atau keberatan KWK di Kecamatan Bula, tercatat keberatan atas adanya kejanggalan terkait dengan jumlah partisipasi pemilih yang tidak wajar in casu yang menggunakan DPTb untuk uraian TPS yang memuat kejanggalan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap kejanggalan-kejanggalan tersebut karenanya saksi mandat Pemohon langsung menolak hasil rekapitulasi pada Model D pada Kecamatan Bula KWK.

Huruf b, eh huruf c. Angka partisipasi pemilih tidak wajar dengan menggunakan DPTb 100%, namun ternyata melebihi 100% sebagaimana terjadi di Desa Amar Sekaru dan Desa Kataloka ... Kotaloka, pada Kecamatan Pulau Gorom.

Angka 2. Bahwa berdasarkan Model D Kejadian Khusus atau keberatan Pulau Gorom, tertanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh Saksi Ridwan Kotarumalos terdapat tingkat partisipasi pemilih yang janggal atau tidak wajar dengan penggunaan 100% DPTb.

Uraian TPS yang memuat kejanggalan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Huruf d. Terjadi penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP atau surat keterangan pada DPTb secara tidak wajar yang terjadi di Desa Kotaloka di Kecamatan Pulau Gorom.

Bahwa penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP pada DPTb secara tidak wajar terjadi di Desa Kotaloka, yang uraiannya sebagai berikut.

Uraian TPS menggunakan KTP. DPTb secara tidak wajar. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa terhadap kejanggalan ini telah dicatatkan dalam Model D Kejadian Khusus atau keberatan Kecamatan Pulau Gorom, tertanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh Saksi Ridwan Kotarumalos, dan oleh karenanya Pemohon menolak hasil rekapitulasi pada Model D hasil Kecamatan Pulau Gorong dikarenakan tata cara pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah.

E. Pemilih pindahan pada Kecamatan Wakate tidak menggunakan Formulir A.5-KWK.

2. Bahwa, berdasarkan D. Kejadian khusus atau keberatan terdapat penggunaan hak pilih pemilih pindahan yang namanya tidak terdaftar dalam DPPH dan tidak menunjukkan model A.5-KWK yang berjumlah 40 pemilih, dan oleh karenanya saksi mandate Pemohon menolak hasil rekapitulasi Kecamatan Wakate dengan tidak menandatangani model D. Hasil Kecamatan Wakate. Izin, Yang Mulia, untuk huruf F dilanjutkan oleh rekan saya, Novi Manaban.

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Huruf F atau E, Pak?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Ya, huruf F.

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

F, ya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA

Huruf F, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan. Atau depan semua, Pak. Ini bukan perlakuan khusus, tapi karena memang tempatnya sudah memungkinkan, silakan.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

F. Terjadi pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pada penggunaan DPTb serta adanya politik uang yang dilakukan oleh tim sukses dengan jargon ADIL di Kelurahan Pulau Panjang Kecamatan Pulau Panjang.

1. Berdasarkan hasil perhitungan Termohon memperoleh suara paslon sebagai berikut.

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasangan (...)

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Dalam tabel (...)

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Nomor.

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1=196.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

1. Pasangan Nomor Urut 1, Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlatur memperoleh suara=196
2. Pasangan Nomor Urut 2, Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian dengan Nomor Urut 2, memperoleh suara=132
3. Pasangan Nomor Urut 3, Rohani Vanath dan Mohammad Ramli Mahu dengan Nomor Urut 3 memperoleh suara=19
Total suara sah 3 ... 347, jumlah suara tidak sah=3.

2. Bahwa, terdapat penggunaan suara pemilih DPTb yang tidak wajar terjadi di TPS 01 Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang sebanyak 10 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% dan TPS 002 Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulau Panjang sebanyak 14 pemilih DPTb yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% dan terhadap hal tersebut telah dicatatkan dalam D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK Pulau Panjang dan oleh karenanya saksi mandat Pemohon menolak hasil rekapitulasi dan tidak menandatangani Formulir model D. Hasil Kecamatan KWK.

G. Terdapat pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di TPS 01 dan TPS 02 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur. Nomor 1, berdasarkan hasil penghitungan Termohon perolehan suara paslon sebagai berikut.

Paslon Nomor 1, Abdul Mukti Keliobas dan Idris (...)

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak usah disebutkan namanya lagi. Pasangan Nomor 1=2.085.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Ya. Pasangan Nomor Urut 1 (...)

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasangan Nomor 2 (...)

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Pasangan Nomor Urut 1 dengan jumlah perolehan suara=2.085. Pasangan Nomor Urut 2 dengan perolehan suara=1.142. Pasangan Nomor Urut 3 dengan perolehan suara=356. Total suara sah=3.583, jumlah suara tidak sah=27.

Nomor 2. Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atas nama Ramli Asomar pada TPS 01 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur yang telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Seram Bagian Timur Nomor: 01/LP/PB/KAB-SBT/31.06/X/2020, tanggal 9 Desember 2020 dan terdapat penggunaan pemilih tambahan sebanyak 16 pemilih DPTb di TPS 02 Desa Suru yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5%.

H. Adanya pemilih DPTb tidak wajar yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% di Kecamatan Teluk Waru. Nomor 1, berdasarkan hasil perhitungan suara Termohon di Kecamatan Teluk Waru memperoleh suara paslon sebagai berikut. Paslon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara=1.104. Paslon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara=761. Paslon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara=761. Total suara sah=2.626. Jumlah suara tidak sah=18.

Nomor 2. Bahwa terdapat penggunaan DPTb yang tidak wajar.

262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pada 13 ... pada 9 TPS nah, dianggap dibacakan.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Pada 9 TPS yang dianggap sudah dibacakan.

I. Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Gorom Timur jumlah suara sah lebih banyak daripada jumlah suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020.

1. Berdasarkan hasil perhitungan Termohon di Kecamatan Gorom Timur memperoleh suara paslon sebagai berikut.

- Paslon Nomor Urut 1 perolehan suara 2.798.
- Paslon Nomor Urut 2 perolehan suara 2.271
- Paslon Nomor Urut 3 perolehan suara 563.
- Total suara sah 5.632
- Jumlah suara tidak sah 39.

2. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Gorom Timur terdapat fakta jumlah suara sah sebanyak 5.617 suara sah yang mana lebih ... yang mana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah suara ... jumlah surat suara yang digunakan halaman terlihat dalam jumlah surat suara yang dikembalikan tercatat 2.590 yang mana seharusnya sesuai dengan perhitungan yang benar adalah sebanyak 2.496 suara ... surat suara.

Berdasarkan hasil di atas dapat Kami simpulkan bahwa berdasarkan 15 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Terjadi pelanggaran yang bersifat TSM yang telah terjadi di: (1) Kecamatan Gor ... 1 Kecamatan Pulau Gorom sampai dengan Bukti P-26. (2) Kecamatan Gorom Timur sampai dengan Bukti P-27. (3) Kecamatan Bula bukti sampai P-28.

264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dan seterusnya dapat dibacakan

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Seterusnya kami anggap dibacakan.

F. Petitum

Berdasarkan (...)

266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan F itu, V Romawi

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

V Romawi.

268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pelan-pelan saja.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Petitum.

270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Bagian Timur Tahun 2020 tanggal 19 ... tanggal 17 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di PPK:
 1. Kecamatan Gorom;
 2. Kecamatan Gorom Timur;
 3. Kecamatan Bula;
 4. Kecamatan Sritaun Wida Timur;
 5. Kecamatan Teluk Waru;
 6. Kecamatan Wakate
 7. Kecamatan Seram Timur
 8. Kecamatan Kilmury
 9. Kecamatan Bula Barat
 10. Kecamatan Tutuk Tolu; dan
 11. Kecamatan Pulau Panjang
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada Kecamatan:
 1. Kecamatan Gorom;
 2. Kecamatan Gorom Timur;
 3. Kecamatan Bula;
 4. Kecamatan Sritaun Wida Timur;
 5. Kecamatan Teluk Waru;
 6. Kecamatan Wakate
 7. Kecamatan Seram Timur
 8. Kecamatan Kilmury
 9. Kecamatan Bula Barat

10. Kecamatan Tutuk Tolu; dan
11. Kecamatan Pulau Panjang
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
untuk melaksanakan Putusan ini,
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.
Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon Novi Manaban, S.H, dan Danu
Hurmuja, S. H.
Terima kasih, Yang Mulia.

272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, tidak ada rekomendasi, Pak, untuk Prinsipal Saudara Seram
Bagian Timur yang tidak dilaksanakan? Tidak ada, ya?

**273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-
XIX/2021: NOVI MANABAN**

Ada, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, didalilkan tidak?

**275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-
XIX/2021: NOVI MANABAN**

Baik, Yang Mulia. Rekomendasinya ada beberapa pengaduan yang
sudah kami sampaikan ke Bawaslu.

276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada produk dari Bawaslu rekomendasi tidak dari pengaduan
Saudara?

**277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-
XIX/2021: NOVI MANABAN**

Ada kurang lebih sekitar 20 pengaduan kami sudah (...)

278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengaduan?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Ya, ke Bawaslu namun 2 yang diproses dan sampai saat ini tahapnya sudah di Gakkumdu. Namun proses selanjutnya belum kami terima Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di Gakkumdu.

Nanti dijawab ya Ibu ya, soal termasuk rekomendasi itu bagaimana sesungguhnya tidak diproses itu karena sesuatu yang kemudian terhenti tanpa penjelasan atukah sebenarnya sudah ada penjelasan dari pihak Gakkumdu bahwa perkara itu prosesnya sampai dimana atau tidak cukup bukti untuk dilanjutkan. Itu kan ada beberapa respons untuk dalam terhadap pengaduan, kalau rekomendasi kenapa tidak dilaksanakan dari Bawaslu, misalnya ada atau tidak tegaskan tidak. Demikian juga Bawaslu ya, Pak. Apa sesungguhnya yang di dalilkan Pemohon nanti dijawab, ya.

Baik, jadi di dalam perkara ini ada pihak ... permohonan Pihak Terkait, masih keluarga juga bukan? 117/PHP.BUP-XIX/2021 Abdul Mukti Kaliobas dan Idris Rumalutur, betul Pak?

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY

Benar, Pak.

282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa Hukumnya siapa namanya Pak?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY

Kalau yang hadir dalam persidangan ini Yang Mulia itu Saya Charles Litaay dan Aziz Mahulette Yang Mulia.

284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ada Kuasanya?

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY

Kalau Kuasa kita ber-empat Yang Mulia.

286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana?

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY

Kalau dalam Surat Kuasa Kita ber-empat. Itu Saya Charles Litaay.

288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ber-empat? Itu Bapak ada kan?

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY

Ada, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, nanti diambil ketetapannya untuk laporan ke prinsipal bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait sudah diterima di MK itu ada ketetapan Kami dari Mahkamah Konstitusi dengan Pak Made PP Kami.

Kemudian, untuk sidang yang akan datang akan dibuka kembali hari Senin, tanggal 8 Februari tahun 2021, pukul 08.00 WIB. Bukan waktu Kabupaten Seram, ya. Satu jam lebih cepat atau dua jam di sana ya, Bu? Wah itu apalagi dua jam. Kita masih subuhan itu. Oke. Jadi WIB di Mahkamah Konstitusi gedung yang sama.

Pemberitahuan ini sudah merupakan pemberitahuan resmi atau panggilan resmi untuk sidang tersebut, sehingga misalnya nanti Mahkamah Konstitusi tidak menyusulkan atau susulkan tapi belum sampai ke Ibu atau Bapak sekalian, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir. Acaranya adalah mendengar jawaban dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum, kemudian keterangan dari Bawaslu, dan keterangan dari Pihak Terkait. Termasuk kalau ada bukti-bukti yang akan diajukan, disiapkan pada awal persidangan seperti tadi setelah dibuka, bukti diserahkan. Kemudian akan diverifikasi. Cukup dari saya, Pak Ketua dan Pak Daniel, silakan.

291. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel ada klarifikasi?

292. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

293. KETUA: ASWANTO

Cukup? Baik. Sebelum kita sahkan alat bukti, saya mau klarifikasi sedikit ini petitum Saudara Nomor 3 itu, ya. Untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU di seluruh TPS pada kecamatan. Ada berapa kecamatan di sana?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

15 kecamatan, Yang Mulia.

295. KETUA: ASWANTO

15. Berarti hanya 11 yang diminta PSU.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Siap, Yang Mulia.

297. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Berdasarkan daftar alat bukti yang Saudara serahkan ada bukti P-1 sampai dengan P-63. Betul, ya?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Siap, Yang Mulia.

299. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada catatan, alat bukti P-56 itu belum dileges, nanti dileges, ya.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Baik, Yang Mulia.

301. KETUA: ASWANTO

Kemudian, bukti P-63 itu tidak sinkron dengan alat bukti. Dengan daftar alat bukti, jadi antara fisik dengan daftarnya tidak sinkron. Nanti di ... apa disinkronkan, ya?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN

Baik, Yang Mulia.

303. KETUA: ASWANTO

Berhubungan langsung dengan bagian Kepaniteraan. Dengan demikian kita sahkan P-1 sampai P dengan P-63 kecuali P ... oh ini P-63 malah belum ... kita sahkan P-1 sampai dengan P-62 kecuali P-56 masih bermasalah kita tidak sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian untuk Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, 73/PHP.BUP-XIX/2021, dan 117/PHP.BUP-XIX/2021 pemeriksaan pendahuluan untuk penyampaian permohonan sudah selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.40 WIB

Jakarta, 29 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

